

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

## **Analisis Peta Rencana Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kota Bandung**

**Osame Isnadia<sup>a</sup> dan Rike Anggun Artisa<sup>b</sup>**

<sup>a,b</sup> Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>a</sup> shame.isnadia@gmail.com, <sup>b</sup> rikeanggunartisa@gmail.com

### **Abstrak**

Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021-2025. Peta Rencana ini merupakan dokumen yang menjelaskan arah dan langkah-langkah persiapan serta pelaksanaan SPBE. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kesesuaian peta rencana SPBE dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Arsitektur SPBE Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan analisis dokumen untuk mengevaluasi Peta Rencana SPBE Kota Bandung tahun 2021-2025. Hasil analisis menunjukkan adanya permasalahan dalam peta rencana SPBE Kota Bandung, sehingga diperlukan optimalisasi guna meningkatkan nilai Indeks SPBE Kota Bandung. Menyoroti pentingnya SPBE dalam instansi pemerintahan, penelitian ini menekankan bahwa rencana SPBE yang terstruktur dengan baik dan selaras merupakan hal yang krusial untuk mewujudkan smart government. Penyelarasan rencana SPBE dengan strategi pembangunan yang lebih luas, seperti RPJMD, memastikan kohesi dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi rencana SPBE menjadi sangat penting untuk meningkatkan indeks SPBE secara keseluruhan di Kota Bandung.

**Kata Kunci:** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peta Rencana, Pemerintahan Digital

## ***Analysis of the Roadmap for the Implementation of Electronic-Based Government System in the Bandung City Government***

### ***Abstract***

*The Bandung City Government issued Bandung Mayor Regulation Number 106 of 2021 concerning the Plan Map for Electronic-Based Government Systems for 2021-2025. This Plan Map is a document that explains the direction and steps for preparing and implementing Electronic-Based Government Systems. This research was conducted to analyze the suitability of the SPBE plan map with the Regional Medium Term Development Plan and the Bandung City Electronic-Based Government Systems Architecture. The research method used is qualitative by conducting document analysis to evaluate the Bandung City Electronic-Based Government Systems Plan Map for 2021-2025. The results of the analysis show that there are problems in the Bandung City Electronic-Based Government Systems plan map, so optimization is needed to increase the value of the Bandung City Electronic-Based Government Systems Index. Highlighting the importance of Electronic-Based Government Systems in government agencies, this research emphasizes that a well-structured and aligned Electronic-Based Government Systems plan is crucial for realizing smart government. Alignment of Electronic-Based Government*

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

*Systems plans with broader development strategies, ensures cohesion and efficiency in achieving development goals. Therefore, optimizing the Electronic-Based Government Systems plan is very important to increase the overall Electronic-Based Government Systems index in Bandung City.*

**Keywords:** *Electronic-Based Government System, Road Map, Digital Government*

## A. PENDAHULUAN

Pemerintah terus didorong untuk melakukan upaya pembaharuan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat yang semakin kompleks. Tata kelola pemerintahan harus di reposisi agar tidak menjadi usang dan mampu merespon kebutuhan publik (Ramdani, dkk, 2023). Inovasi menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah daerah karena melalui inovasi dapat dimunculkan berbagai cara pemecahan masalah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi ini lebih jauh lagi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Penerapan inovasi ini salah satunya yaitu melalui pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki tujuan untuk 1) mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 2) Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; 3) Mewujudkan sistem pemerintah berbasis elektronik yang terpadu.

Hal tersebut kemudian turut direspon oleh Pemerintah Kota Bandung dengan komitmen menerapkan kebijakan tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung mempunyai peran penting sebagai leading sektor terutama terkait dengan penyediaan dan pengelolaan sistem tata kelola TIK di Kota Bandung. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bandung sudah mulai berjalan dari tahun 2018, pada setiap tahunnya dilakukan, bahkan sampai pada tingkatan kelurahan (Ramdani, 2018) serta berbagai jenis layanan pemerintah seperti layanan kesehatan (Ramdani, 2019). Evaluasi tersebut menghasilkan indeks yang dikeluarkan oleh KemenPAN-RB.

Dari tabel perkembangan Indeks SPBE Kota Bandung, dapat di lihat bahwa realisasi Indeks SPBE Kota Bandung meningkat dari tahun 2018-2020 namun pada Tahun 2021 mengalami penurunan Nilai Indeks sebesar 3,19 dari target sebesar 3,25. Hal ini menjadikan Kota Bandung berada di posisi ke-5 dengan nilai indeks SPBE di Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya penurunan indeks SPBE menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam pelaksanaan SPBE di Kota Bandung.

Tabel 1. Perkembangan Nilai Indeks SPBE Kota Bandung Tahun 2018 s.d 2021

Tahun	Target	Realisasi	Predikat SPBE
2018	2.9	3.11	Baik
2019	3.0	3.72	Sangat Baik
2020	3.01	3.78	Sangat Baik
2021	3,25	3,19	Baik
2022	3,3	3,61	Sangat Baik

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kota Bandung

Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai upaya memperbaiki dan pematangan pelaksanaan SPBE. Pada peraturan tersebut terdapat penjelasan mengenai Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan Internal merupakan landasan pelaksanaan dari proses Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Selanjutnya, Tata Kelola SPBE dilaksanakan agar memastikan penerapan Unsur SPBE secara terpadu. Salah satu Unsur SPBE adalah Peta Rencana SPBE.

Dalam Penyusunan Peta Rencana SPBE pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Peta Rencana SPBE 2021-2025. Peta

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Rencana SPBE disusun dalam jangka waktu 5 tahun serta dievaluasi secara periodik, minimal paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu disesuaikan dengan urgensi kebutuhan. Pada evaluasi ini Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peran penting, diantaranya melakukan sosialisasi serta survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Dinas/Perangkat Daerah seluruh Kota Bandung dengan berfokus pada rencana yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah, tidak terkecuali pada level implementasi dalam penguatan digitalisasi pada instansi pemerintah (Wulandari et al., 2021) maupun para personil yang ada didalamnya (Wulandari et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memfokuskan tulisan ini pada analisis peta rencana pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota Bandung sekaligus mengidentifikasi kendala dan upaya yang perlu dilakukan dalam menyelaraskan peta rencana dengan berbagai ketentuan tentang pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota Bandung.

## B. PEMBAHASAN

Peta Rencana SPBE keberadaannya sangat penting bagi pelaksanaan SBPE karena dokumen tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan akibat pencapaian sasaran yang kurang terarah. Peta Rencana SPBE ini menjabarkan proses perencanaan penyelenggaraan SPBE melalui serangkaian program dan kegiatan. Peta Rencana ini diharapkan juga selaras dengan dokumen RPJMD Kota Bandung dan secara detail mendeskripsikan arah dan langkah pelaksanaan SPBE yang mengacu kepada Arsitektur SPBE Kota Bandung 2021-2025.

Sumber : Laporan Kegiatan Diskominfo Kota Bandung

Upaya Penyelarasan ini dipimpin oleh Diskominfo Kota Bandung, dengan melibatkan setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kota Bandung. Diskominfo Kota Bandung menggali informasi dari setiap OPD melalui pengisian kuesioner Peta Rencana SPBE yang memuat 7 muatan sesuai dengan program-program inisiatif dari setiap OPD.

Seluruh kuesioner direkap dan hasilnya dianalisis untuk memberikan masukan dan tinjauan pada perencanaan dan pelaksanaan Peta Rencana SPBE hingga Tahun 2023. Adapun kendala yang dihadapi oleh Diskominfo Kota Bandung ketika melakukan upaya penyelarasan Peta Rencana SPBE, diantaranya:

- 1) Belum adanya Pedoman Dasar Peta Rencana SPBE Kota Bandung yaitu Peta Rencana SPBE Nasional.
- 2) Tidak detailnya Program/Kegiatan dari Perangkat Daerah dalam Kuesioner Peta Rencana.
- 3) Belum adanya layanan digital tematik yang terintegrasi dari seluruh perangkat daerah.
- 4) Adanya Gap Tahun Peta Rencana SPBE Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung.

Dalam menghadapi kendala tersebut, maka terdapat sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan sehingga keberadaan peta rencana SPBE di Kota Bandung dapat dioptimalkan fungsinya dalam mengawal pelaksanaan SPBE di Kota Bandung, diantaranya:

1. Perlunya Menyelaraskan Ruang lingkup Peta Rencana

Ruang lingkup Peta Rencana bertujuan untuk memastikan kebijakan internal SPBE sudah mengatur muatan Peta Rencana SPBE, agar sesuai dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang SPBE serta mengatur arah integrasi SPBE baik secara vertikal maupun horizontal (semua unit kerja/perangkat daerah). Dalam Muatan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kota Bandung terdapat

Tabel 2. Kuesioner Review Peta Rencana

No	Project/Activities	Target					
		Baseline 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	<b>Manajemen</b>						
A	Implementasi dan kesetaraan pada pedoman manajemen SPBE Kota Bandung	(Baseline)	(Target)	(Target)	(Target)	(Target)	(Target)
	- Implementasi Manajemen SPBE						
	- Evaluasi Manajemen SPBE						
	- Tindaklanjut Hasil Evaluasi Manajemen SPBE						
2	<b>Layanan</b>						
A	Program layanan pemerintahan terintegrasi dan teramkoneksasi	(Baseline)	(Target)	(Target)	(Target)	(Target)	(Target)
	- Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Publik						
	- Integrasi dan Sinkronisasi Layanan Administrasi Pemerintahan						
	- Evaluasi dan Collinsasi Layanan Publik						
	- Evaluasi dan Collinsasi Layanan Administrasi Pemerintahan						
3	<b>Aplikasi</b>						
A	Program Integrasi Aplikasi dan Sistem Informasi	(Baseline)	(Target)	(Target)	(Target)	(Target)	(Target)
	- Optimalisasi dan Integrasi Master Data						
	- Optimalisasi dan Integrasi User Management						
	- Optimalisasi dan Integrasi Portal Aplikasi (Super App)						
	- Meningkatkan Kepercayaan Aplikasi ke Komunitas						
	- Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi dengan Layanan IP						
	- Optimalisasi dan Integrasi Aplikasi dengan Layanan PD lainnya						
4	<b>Keamanan</b>						
A	Program Integrasi Keamanan SPBE	(Baseline)	(Target)	(Target)	(Target)	(Target)	(Target)
	- Perluasan Implementasi Standar Keamanan SPBE						
	- Peningkatan SPBE Temelora						



# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Dasar/Pedoman Peta Rencana SPBE yaitu Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota Bandung, RPJMD Kota Bandung. Berdasarkan hasil analisis pada Peta Rencana, penulis menemukan permasalahan dalam Aspek Ruang Lingkup Peta Rencana yang menggambarkan belum adanya Peta Rencana SPBE Nasional yang dijadikan salah satu dasar/pedoman penyusunan Peta Rencana SPBE. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Kota Bandung dimana Peta Rencana SPBE Nasional merupakan dokumen penting untuk dijadikan acuan pembuatan Peta Rencana SPBE Daerah.

2. Penentuan Program dan Kegiatan  
Penentuan Program dan Kegiatan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan disusun berdasarkan inisiatif strategis yang pelaksanaannya dilakukan perangkat daerah serta terdapat indikator capaian tahunan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Pemerintah daerah. Pada pelaksanaannya penulis menemukan permasalahan pada Penentuan Program dan Kegiatan yaitu masih banyak OPD yang belum mengerti dalam menentukan program/kegiatan yang akan dilakukan, sehingga pada pengisian kuesioner Peta Rencana SPBE masih tidak detail program/kegiatan yang disampaikan SKPD.
3. Mengkategorikan sesuai Inisiatif strategis Arsitektur SPBE Kota Bandung  
Tujuan dari perlunya mengkategorikan sesuai inisiatif strategis memastikan setiap inisiatif strategis merupakan tindak lanjut dari rencana tindakan berdasarkan analisis kesenjangan yang tertuang pada Arsitektur SPBE Kota Bandung 2021-2025, serta dapat mengarahkan pada integrasi layanan digital tematik untuk beberapa atau seluruh perangkat daerah.  
Namun, hasil analisis yang ditemukan penulis tentang Peta Rencana bahwa

inisiatif strategis dalam Arsitektur SPBE Kota Bandung 2021-2025 disusun sudah berdasarkan analisis kesenjangan tetapi belum mengarah pada satu tematik layanan digital yang terintegrasi (beberapa atau semua perangkat daerah) karena masih ditemukan ego sektoral di perangkat daerah.

4. Mengsinergikan Masa berlaku Peta Rencana SPBE  
Masa berlaku Peta Rencana SPBE perlu disinergikan dengan RPJMD Kota Bandung. Berdasarkan analisis penulis pada Peta Rencana, masa berlaku Peta Rencana SPBE Kota Bandung masih terdapat Gap Tahun, yaitu terdapat Gap antara Peta Rencana SPBE Kota Bandung tahun 2021-2025 dengan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 dengan melihat periode tahun RPJMD yang hampir selesai namun Peta Rencana yang baru dimulai tahun 2021.
5. Menyesuaikan Peta Rencana dengan Sistematis Peta Rencana SPBE  
Peta Rencana SPBE perlu dipastikan sesuai dengan sistematis dokumen Peta Rencana SPBE yang menjelaskan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Dari hasil analisis ditemukan bahwa Peta Rencana SPBE Kota Bandung sudah sesuai dengan sistematis dokumen Peta Rencana SPBE yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Bagian tubuh Peta Rencana dan Lampiran Peta Rencana SPBE.
6. Menghubungkan antara tahapan pelaksanaan SPBE dengan daftar kegiatan/rencana  
Dalam peta rencana perlu ada keterhubungan antara tahapan pelaksanaan SPBE dengan daftar kegiatan/rencana. Hal itu dilakukan untuk memastikan adanya panduan arah dan Langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kota Bandung. Hasil analisis ditemukan bahwa rencana-rencana kegiatan dari OPD yang akan dilakukan beserta waktu pelaksanaan sudah sesuai dengan tahapan pelaksanaan SPBE.
7. Menentukan Sasaran Program/Kegiatan dari Dokumen Strategis

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

Setiap sasaran program/kegiatan yang terdapat di dalam Peta Rencana perlu dipastikan selaras dengan dokumen strategis atau dalam hal ini adalah RPJMD Kota Bandung. Berdasarkan hasil Review Peta Rencana SPBE Kota Bandung pada aspek ini menunjukkan bahwa tidak terlihat keterhubungan antu pointer yang menunjuk kepada sasaran dalam RPJMD untuk mendukung pencapaian target/indikator.

8. Memastikan Kategori Muatan sesuai dengan Muatan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Peta rencana SPBE perlu memuat tujuh muatan peta Rencana SPBE sesuai amanat Perpres No.95 Tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa Peta Rencana Kota Bandung telah memuat tujuh muatan Peta Rencana SPBE sesuai amanat Perpres No.95 Tahun 2018 secara keseluruhan dan aspek tersebut sudah sesuai dengan ketentuan serta tujuan yang ditetapkan.

9. Memastikan keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

Terkait dengan keterpaduan rencana dan anggaran SPBE ini memiliki maksud untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Peta Rencana SPBE Kota Bandung 2021-2025 telah direncanakan dan dianggarkan sehingga mendukung efisiensi dan keterpaduan dalam penerapan/penyelenggaraan SPBE. Hasil analisis diketahui bahwa secara keseluruhan aspek ini sudah sesuai dengan ketentuan serta tujuan aspek dimana program/kegiatan sudah dianggarkan dan masuk ke dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

10. Perlunya Pengembangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

Pada Peta Rencana SPBE idealnya terdapat inisiatif strategis melalui perencanaan satu tematik layanan digital terintegrasi yang mencakup beberapa atau seluruh unit kerja/perangkat daerah. Berdasarkan analisis kesenjangan Arsitektur SPBE Kota Bandung terdapat beberapa taksonomi

proses bisnis yang ada pada RAB tetapi tidak dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Hal tersebut karena beberapa hal, diantaranya :

- a. Ada proses bisnis pada RAB yang merupakan kewenangan pusat, seperti: pertahanan, hubungan luar negeri, dan lain-lain.
- b. Ada proses bisnis pada RAB yang memang tidak dilaksanakan di Kota Bandung, seperti: pertambangan, kelautan, dan lain-lain.

Meskipun demikian, untuk saat ini untuk proses bisnis pemerintahan kota Bandung dirasakan sudah melingkupi seluruh kebutuhan layanan masyarakat, sehingga dapat dikatakan sudah mencukupi dan tidak membutuhkan pengembangan.

## C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Dalam pelaksanaan SPBE Kota Bandung masih ada yang perlu diperbaiki, salah satunya pada Unsur SPBE yaitu Peta Rencana SPBE Kota Bandung. Peta Rencana SPBE merupakan dokumen penting yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE. Penyusunan Peta Rencana SPBE disusun dalam jangka waktu lima tahun serta direview dan dievaluasi secara periodik dengan urgensi kebutuhan.

Dengan adanya Peta Rencana SPBE diharapkan dapat meningkatkan target Indeks SPBE Kota Bandung sesuai dengan penekanan visi SPBE pada integrasi proses dan data. Adapun rekomendasi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan dari terkait dengan Peta Rencana SPBE sebagai berikut:

- 1) Dilakukannya percepatan penyusunan Peta Rencana SPBE Nasional sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik di daerah.
- 2) Perlunya workshop pembekalan penyusunan Peta Rencana 2023 dengan seluruh SKPD Kota Bandung agar pembuatan Peta Rencana lebih jelas serta terarah.

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- 3) Membuat program layanan digital terintegrasi padat satu pintu yang dapat digunakan oleh seluruh OPD Kota Bandung.
- 4) Dilakukannya rapat penyesuaian mengenai masa berlaku Peta Rencana SPBE Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung

## REFERENSI

- Diskominfo Kota Bandung. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfo Kota Bandung.
- Diskominfo Kota Bandung. (2023). Laporan Kegiatan Diskominfo Kota Bandung.
- Kawidjaya, S. P., Nugroho, A. B., Pradesa, H. A., & Taufik, N. I. (2023). Persepsi Atas Kualitas Sistem Dan Informasi Dalam Mendorong Kepuasan Pengguna Sistem BJB Greens. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 7775-7788.  
<https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.2548>
- Maulana, R.R., Priatna, R. (2021). Perancangan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Menunjang Digitalisasi Desa. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 419 - 423.  
<http://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3753>
- Mulyadi, D., Maulana, R. (2022). Policy Evaluation of Village Head Election in Bandung Regency. *Proceedings of the Third International Conference Administration Science (ICAS 2021)*. DOI 10.4108/eai.15-9-2021.2315255.
- Mulyadi, D., Maulana, R. R. (2021). Government Collaboration Model for Disaster Management Policy in West Bandung Regency. *Proceedings of the 2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 100 - 103.  
<http://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.019>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2018).
- Peraturan Walikota Bandung No. 60 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (2021).
- Peraturan Walikota Bandung No.106 Tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025, (2021).
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, (2019).
- Pramuditha, R., & Agustina, I. (2022). Persepsi Masyarakat Pengguna Atas Kualitas Pelayanan E-KTP Pada Kecamatan Bogor Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(1), 884-901.  
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i1.1922>
- Ramdani, E.M. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan. *Sawala J. Adm. Negara*, 6 (1), 31 - 48.  
<https://doi.org/10.30656/sawala.v6i1.520>
- Ramdani, E.M. (2019). Analisis Keberlanjutan Inovasi Lokal: Studi Kasus Inovasi e-Health Cimalaka Sehat. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 22 (2), 163-182.  
<http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v22i2.159>
- Ramdani, E.M; Abubakar, R.R.T.; Artisa, R.A. (2023). Digital Governance Strategy to Realize Adaptive, Agile, and Fluid Government in the Provincial Government of West Java. *Atlantis Press: Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022)*, 154-162. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3\\_17](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_17)
- Taufik, N.I., Wijayanti, R. (2021). Penerapan E-Office di Lingkungan Politeknik STIA LAN Bandung. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 424-428.  
<http://dx.doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3754>

# konferensi nasional ILMU ADMINISTRASI 7.0

"Memperkokoh Pembangunan Bangsa  
Melalui Penguatan Nilai Publik Yang Berdampak  
Dalam Menapaki Indonesia Berdaulat, Maju, dan Mandiri"

7 September 2023 | Politeknik STIA LAN Bandung

- Taufik, N.I., Sulistianti, I., Pradesa, H.A. (2022). Penilaian risiko pada layanan pembayaran pensiun PT Asabri Bandung: Sebuah praktek terbaik untuk penguatan tata kelola perusahaan. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5 (2), 857-867. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1729>
- Taufik, N., Pradesa, H., & Agustina, I. (2022). Persepsi Risiko Pada Pemerintahan Desa: Sebuah Tinjauan Dari Perspektif Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 16(1), 120-135. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v16i1.353>
- Wijayanti, R., Taufik, N.I. (2022). The Role of Village Funds to Improve Community Welfare: A Study in West Bandung Regency. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development (IJEED)*, 5 (1), 155-163. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i1.1641>
- Wulandari, I., Priatna, R., & Andikaputra, F. A. (2021). Intellectual Capital Implementation Strategy Based on the Industrial Revolution 4.0 at the Bandung City Information and Communication Office. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 285-288. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210629.054>
- Wulandari, I., Priatna, R., & Andikaputra, F. A. (2022). Sumedang Regency ASN Digital Literacy (ASN Digital Literacy Improvement Strategy Sumedang Regency). *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 6(2), 192-202. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v6i2.638>